
ARTIKEL PENELITIAN

**IMPLEMENTASI PROGRAM DESA MANDIRI MELALUI
PENINGKATAN INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM)**

Endang Wahyuni,[✉] UI Qadri, Sri Syabanita Elida

Politeknik Negeri Pontianak

Abstrak

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Badau melalui peningkatan indeks desa membangun (IDM). Adapun hasil penelitian ini adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Badau dengan melibatkan masyarakat dari tahap awal perencanaan sampai tahap pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik 2 rabat beton yang telah dibangun dan 1 masih dalam proses dan 1 drainase. Pemerintah desa juga menitipkan modal kepada PKK dan Bumdes untuk modal, menghimbau gotong royong yang dilakukan pasti dalam 2 bulan, memberikan edukasi dalam mengolah sampah. Untuk kegiatan gotong royong dan mengolah sampah merupakan indeks ketahanan sosial yang memiliki indikator pada kegiatan yang dilakukan. Sedangkan pembangunan fisik rabat beton dan drainase serta pengembangan Bumdes dan PKK merupakan indeks ketahanan ekonomi yang memiliki indikator dari kegiatan yang dilakukan. Indikator-indikator peningkatan IDM terdapat dalam komponen IDM antara lain (1) Indeks ketahanan sosial, terdiri dari dimensi kesehatan, pendidikan, modal sosial, permukiman. Dimensi terdiri dari perangkat indikator, (2) Indeks ketahanan ekonomi, terdiri dari dimensi keragaman produksi, perdagangan, akses distribusi, akses kredit, lembaga ekonomi, keterbukaan wilayah. Dimensi terdiri dari perangkat indikator, (3) Indeks ketahanan lingkungan, terdiri dari dimensi kualitas lingkungan dan potensi dan tanggap bencana. Dimensi terdiri dari perangkat indikator.

Kata Kunci: Upaya Desa Badau, Peningkatan Desa, Indeks Desa Membangun

[✉] Alamat korespondensi:

Politeknik Negeri Pontianak

Jl. Ahmad Yani, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia

E-mail: 3ndan9wahyun1@gmail.com

PENDAHULUAN

Kalimantan Barat merupakan provinsi yang sangat strategis dilihat dari aspek geografisnya. Letak Kalimantan Barat yang berbatasan dengan negara tetangga seperti Malaysia (Serawak), dan Brunei memiliki arti sangat penting bagi bangsa Indonesia secara umum dan bagi Kalimantan Barat sendiri secara khusus. Kalimantan barat terdiri dari 12 kabupaten dan 2 kota, secara geografis beberapa kabupaten berbatasan dengan negara tetangga termasuk Kabupaten Kapuas Hulu khususnya Desa Badau di Kecamatan Badau.

Secara administratif Badau terletak di Kabupaten Kapuas hulu berbatasan langsung dengan Desa Lubuk Antu yang berada di Serawak-Malaysia. Badau dengan ibukota Kabupaten Kapuas Hulu yaitu Putussibau dapat di tempuh melalui jalan darat dengan kendaraan bermotor sekitar 8 jam. Badau memiliki potensi di sektor perkebunan, perikanan dan pariwisata.

Pada tahun 2019 pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat membuat kebijakan publik dalam rangka implementasi program desa mandiri yang telah dilakukan beberapa tahun lalu. Namun, baru satu desa di Kalimantan Barat yang berstatus desa mandiri. Untuk itu, pemerintah provinsi menetapkan kebijakan melalui Peraturan Gubernur mengenai percepatan status kemajuan dan kemandirian desa yang didasarkan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM) pada Pasal 1 poin 2 menyatakan pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya

kesejahteraan masyarakat desa. Selanjutnya pada poin 8 menyatakan IDM adalah indeks komposit yang dibentuk dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi desa.

Dalam implementasi program desa mandiri melalui peningkatan indeks desa membangun, pemerintah provinsi menetapkan 63 desa di Kalimantan Barat sebagai target dan sasaran peningkatan IDM. Ada enam desa di Kabupaten Kapuas Hulu menjadi target dan sasaran dalam program desa mandiri. Kebijakan publik dalam bentuk program yang dibuat pemerintah Kalimantan Barat dalam rangka membangun desa dalam bentuk program desa mandiri dengan target dan sasaran rencana aksi peningkatan IDM yaitu 63 desa asal 12 kabupaten di wilayah Kalimantan Barat. (TribunPontianak.co.id)

Desa di Kabupaten Kapuas Hulu yang menjadi target dan sasaran rencana aksi peningkatan IDM meliputi Desa Semangut Utara, Nanga Tepuai, Sepandan, Miau Merah, Riam Piyang dan Badau.

Berdasarkan informasi awal mengenai IDM, jumlah IDM di enam desa yang berada di Kabupaten Kapuas Hulu yaitu Desa Semangut Utara (0,7329), Desa Nanga Tepuai (0,7125), Desa Sepandan (0,7122), Desa Miau Merah (0,8010), Desa Riam Piyang (0,6432) dan Desa Badau (0,6251). Status desa maju yaitu Desa Semangut Utara, Nanga Tepuai, Sepandan dan Miau Merah sedangkan Desa Riam Piyang dan Badau berstatus desa berkembang.

Berdasarkan data IDM dari 6 desa yang menjadi target dan sasaran, Desa Badau memiliki jumlah IDM lebih rendah dari desa lain yang diusulkan.

Dalam Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2019 tentang percepatan peningkatan status kemajuan dan kemandirian desa menjelaskan desa berkembang adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum mengelola secara optimal. Dari penjelasan yang terdapat dalam aturan dapat dikatakan Desa Badau yang berstatus berkembang merupakan desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi. Akan tetapi Desa Badau belum mendapat status desa mandiri padahal secara geografis desa badau berada di perbatasan Indonesia-Malaysia dan dari lingkungan punya potensi alam dalam membangun desa.

Selanjutnya dalam Pasal 6 menyatakan pemenuhan terhadap indikator pembentuk IDM berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian Pasal 7 IDM terdiri dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ketahanan lingkungan. Adanya pemenuhan terhadap indikator untuk peningkatan indeks desa membangun merupakan tantangan bagi pemerintah daerah dan terutama pemerintah desa dalam implementasi program desa mandiri.

Peningkatan IDM di Desa Badau menjadi tantangan bagi pemerintah Desa Badau dan masyarakat Desa Badau dalam peningkatan IDM untuk meningkatkan status desa dengan pemenuhan terhadap indikator pembentuk IDM yang terdiri dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan lingkungan.

METODE

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, dimana hasil dari penelitian ini dapat memberikan gambaran

bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah desa dan dukungan pemerintah daerah dalam peningkatan IDM. Selama penelitian dilakukan penulis mengembangkan konsep dan menghimpun data, fakta akan tetapi penulis tidak akan melakukan pengujian hipotesa (Singgarimbun 1989:4).

Adapun lokasi penelitian dilakukan di Desa Badau Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu adapun yang dijadikan obyek penelitian ini adalah Desa Badau Kabupaten Kapuas Hulu dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Desa badau adalah satu di antara enam desa di Kabupaten Kapuas Hulu yang menjadi target dan sasaran rencana aksi peningkatan IDM dan memiliki jumlah indeks lebih rendah di banding lima desa lainnya di Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Desa Badau menjadi target dan sasaran peningkatan IDM dalam percepatan peningkatan status kemajuan dan kemandirian desa yang terapkan pada tahun 2019 melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Badau dan seorang informan dari masyarakat. Adapun pertimbangan penentuan subyek penelitian dan informan kunci dengan alasan bahwa mereka adalah orang-orang yang mengalami, mengetahui dan memahami apa yang peneliti inginkan.

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan penulis menggunakan pedoman wawancara dan. Pedoman wawancara adalah catatan berupa daftar pertanyaan yang telah disusun untuk mempermudah dalam mendapatkan informasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan pedoman observasi adalah pengamatan penulis

terhadap Desa Badau dari indikator penilaian dalam peningkatan IDM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program desa mandiri di Kalimantan Barat pada tahun 2019 dilaksanakan dengan meningkatkan IDM pada desa-desa yang belum berstatus mandiri. Di awal tahun 2019 pemerintah provinsi yaitu gubernur membuat Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1 tahun 2019 tentang percepatan peningkatan status kemajuan dan kemandirian desa. Tujuan dari peraturan Gubernur ini untuk mengubah status desa yang terdiri dari status desa sangat tertinggal dan desa tertinggal menjadi desa berkembang serta dari desa berkembang dan desa maju menjadi desa mandiri.

Adapun sasaran dari peningkatan status kemajuan dan kemandirian desa adalah seluruh desa di daerah dengan target prioritas ditetapkan melalui rencana aksi daerah percepatan peningkatan status kemajuan dan kemandirian desa. Peraturan Gubernur yang dibuat didasarkan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 tahun 2016 tentang IDM pada pasal 1 poin 2 menyatakan pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Selanjutnya pada poin 8 menyatakan IDM adalah indeks komposit yang dibentuk dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi desa.

Kalimantan Barat baru memiliki satu desa mandiri yang berada di Kabupaten Kayong Utara, upaya pemerintah provinsi untuk meningkatkan status desa desa lain yang ada di Kalimantan Barat dengan Peraturan Gubernur yang

memuat IDM yang nantinya menjadi acuan bagi pemerintah desa dalam upaya nya meningkatkan status desa. pembangunan desa dilakukan dengan menggunakan IDM menjadi upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, pada tahun 2019 pemerintah provinsi Kalimantan Barat mengimplementasikan IDM pada desa-desa yang menjadi target dan sasaran peningkatan status kemajuan dan kemandirian desa. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat menetapkan 63 desa di Kalimantan Barat sebagai target dan sasaran peningkatan IDM. (TribunPontianak.co.id)

Kegiatan Peningkatan IDM

Percepatan peningkatan status kemajuan dan kemandirian desa yang direncanakan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat. Kemajuan dan kemandirian desa adalah suatu kondisi tingkat perkembangan desa yang diukur melalui IDM yang terdiri dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan lingkungan. Peningkatan status desa dari desa sangat tertinggal berubah meningkat menjadi desa tertinggal, dan meningkat menjadi desa berkembang yang selanjutnya berubah status menjadi desa maju kemudian meningkat menjadi desa mandiri. pemerintah desa berperan penting dalam meningkatkan status desa dengan menggunakan indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan lingkungan sebagai acuan dalam membuat kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan IDM. kegiatan yang dilakukan di desa sebagai upaya desa melakukan kegiatan membangun desa di tahun 2019, dengan

menggunakan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa.

Desa yang belum berstatus mandiri menjadi sasaran untuk ditingkatkan statusnya dengan meningkatkan IDM yang terdiri dari komponen indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan lingkungan. Desa Badau yang berkedudukan di Kabupaten Kapuas Hulu menjadi salah satu desa yang diusulkan menjadi sasaran peningkatan status desa menjadi desa mandiri. status desa yang saat diusulkan masih status berkembang dengan IDM dengan nilai berada di bawah desa-desa lain yang terdapat di Kabupaten Kapuas Hulu.

Peningkatan IDM dilakukan pemerintah desa dan masyarakat desa bersama-sama. Pemerintah Desa Badau mendapatkan informasi terkait peningkatan status desa melalui IDM dari pemerintah kabupaten, pengisian data-data desa melalui sebuah aplikasi yang terhubung ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat. Komponen yang diisi oleh pemerintah desa meliputi profil desa. aplikasi pengisian pengukuran desa (IDM) memuat pertanyaan kuesioner yang diisi oleh aparat pemerintah desa, pengisian yang dilakukan oleh aparat pemerintah desa dengan didampingi oleh aparat dari kecamatan yang ditugaskan untuk menjadi pendamping desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan desa. Tugas yang dilakukan terkait membangun desa merupakan tugas yang memerlukan dukungan dan partisipasi masyarakat desa.

Pelaksanaan Kegiatan Desa Badau Dalam Meningkatkan IDM

Pemerintah Desa Badau mendapat informasi dari pemerintah Kabupaten

Kapuas Hulu mengenai percepatan peningkatan status kemajuan dan kemandirian desa dengan meningkatkan IDM, nilai IDM merupakan nilai komposit yang terkumpul dari tiga komponen indeks ketahanan meliputi indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan lingkungan. Setiap indeks ketahanan memiliki dimensi sebagai berikut: indeks ketahanan sosial terdiri dari dimensi modal sosial, dimensi kesehatan, dimensi pendidikan dan dimensi permukiman; Indeks ketahanan ekonomi dengan dimensi ekonomi; Indeks ketahanan lingkungan dengan dimensi lingkungan ekologi.

Upaya dilakukan oleh pemerintah desa dengan melibatkan para ketua rukun tetangga (RT) sebagai pihak yang menjadi sarana menyampaikan informasi kepada masyarakat desa yang berada dalam RT, komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan para ketua RT dalam upaya melaksanakan peningkatan IDM yang menjadi tahap awal bagi keberadaan masukan terhadap rencana pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Rencana pembangunan dilakukan dengan adanya masukan dari masyarakat Desa Badau melalui RT yang ada di dalam wilayah Desa Badau, adapun jumlah RT sebanyak 15 yang menjadi penyambung hubungan komunikasi dengan masyarakat desa. dapat dikatakan peran RT begitu penting dalam hubungan antara pemerintah desa dengan masyarakat desa, selanjutnya RT menyampaikan informasi yang diterima dari pemerintah desa kepada masyarakat desa yang berada dalam wilayah rukun tetangganya. Setelah informasi disampaikan kepada masyarakat desa badau dalam wilayah RT yang

bersangkutan, mulai dibentuk agenda musyawarah Desa Badau yang diadakan di kantor desa dalam ruangan kantor bagian depan yang tidak bersekat sehingga memiliki ruang yang cukup untuk dilakukan musyawarah desa yang dihadiri oleh masyarakat Desa Badau, pemerintah Desa Badau, dan badan permusyawaratan desa (BPD). Setiap dusun dan RT menyampaikan infrastruktur di wilayah RT yang dianggap penting untuk dilakukan pembangunan atau perbaikan. Infrastruktur yang ada di Desa Badau untuk akses masyarakat meliputi jalan desa di wilayah permukiman dan jalan besar yang merupakan akses pos lintas batas negara, jalan di permukiman masyarakat desa yang bukan merupakan akses ke perbatasan atau ke Putussibau adalah jalan semen kecil yang hanya bisa dilalui satu mobil kecil dan jalan aspal yang lebih lebar. Dalam musyawarah yang dilakukan menghasilkan infrastruktur yang perlu di bangun serta sarana dan prasarana desa lainnya yang memerlukan pembangunan atau perbaikan.

Hasil dari musyawarah desa menjadi usulan kepada pemerintah desa yang disampaikan kembali melalui RT, usulan dari masyarakat desa di bahas kembali oleh pemerintah desa dalam menentukan sarana dan prasarana yang paling rendah dan menjadi prioritas. Infrastruktur yang ditentukan berdasarkan prioritas oleh pemerintah desa yang memiliki sumber daya keuangan yang terbatas pada dana desa tanpa sumbangan atau bantuan dari luar wilayah desa. adapun sumber daya manusia adalah masyarakat Desa Badau yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2019 ini masih dalam proses. Dari musyawarah desa yang ditentukan oleh pemerintah desa yang paling prioritas yaitu pembangunan rabat beton yang

berada di tiga lokasi juga ada pembangunan satu drainase yang merupakan pembangunan fisik, ada juga perbaikan jembatan yang merupakan akses masyarakat untuk ke sarana dan prasarana pendidikan, mengadakan kegiatan gotong royong di Bukit Pendam.

Selanjutnya pemerintah desa menginformasikan kepada masyarakat desa dalam sebuah spanduk yang berisi kegiatan pembangunan yang terpilih dari usulan dan waktu pelaksanaan yang masih dalam tahun 2019 yang disertai jumlah dana. Melalui spanduk informasi disampaikan dan dilaksanakan oleh masyarakat desa badau. kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat desa berupa pembangunan fisik yang masih dalam proses pengerjaan dan kegiatan lain yang telah selesai seperti gotong royong melakukan bersih-bersih di Bukit Pendam yang dilakukan oleh masyarakat desa dalam waktu tiga bulan sekali pada kondisi tertentu namun yang pasti gotong royong diadakan dua bulan sekali, pemerintah desa dan pemerintah kecamatan, dua pembangunan rabat beton telah selesai sedang satu rabat beton dan satu drainase masih dalam proses. Kegiatan selain pembangunan fisik yaitu pengelolaan Bumdes oleh masyarakat desa dari modal yang dititipkan oleh pemerintah desa, pengelolaan simpan pinjam oleh PKK yang modal nya juga bersumber dari anggaran desa. upaya lain yang dilakukan pemerintah desa yaitu memberikan edukasi pada pengelolaan sampah yang bisa diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Dalam pengadaan tong sampah masih dalam proses pengadaan, pemerintah desa berupaya menanamkan perhatian pada sampah agar lingkungan terjaga dan bersih juga diharapkan dari sampah olahan menjadi produk yang dapat digunakan oleh masyarakat desa.

Kegiatan Desa Dalam Indikator Komponen IDM

Desa Badau di tahun 2019 memiliki agenda kegiatan yang dilaksanakan bersama masyarakat Badau yang sedang berjalan dan beberapa sudah selesai dilakukan secara fisik sedang yang lain masih proses penyelesaian. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Badau bersama masyarakat desa yang terlibat langsung dari awal perencanaan sampai pelaksanaan, kegiatan yang dilakukan secara bersama merupakan kerja tim masyarakat desa dan pemerintah desa. kegiatan yang dilakukan merupakan kegiatan yang diupayakan meningkatkan skor IDM desa yang terdiri dari komponen indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan lingkungan.

Upaya yang dilakukan pemerintah desa dan masyarakat desa dengan membangun rabat beton 3 dan telah menyelesaikan 2 rabat beton dan 1 drainase masuk kedalam perangkat indikator keterbukaan wilayah dengan perangkat indikator per item yaitu kualitas jalan desa dan jalan yang dapat dilalui kendaraan bermotor. Pembangunan rabat beton masuk Indikator keterbukaan wilayah merupakan indikator dari indeks ketahanan ekonomi. Begitu juga dengan kegiatan pengelolaan Bumdes dalam rangka mengembangkan ke arah perdagangan untuk indikator lembaga ekonomi dengan indikator per item tersedianya lembaga ekonomi rakyat (Bumdes) yang masuk dalam komponen indeks ketahanan ekonomi.

Sedangkan kegiatan dalam indeks ketahanan sosial dengan adanya gotong royong oleh masyarakat desa di desa badau termasuk dalam indikator solidaritas sosial dengan indikator per

item kebiasaan gotong royong, pelaksanaan 3 bulan sekali dan pasti dilaksanakan 2 bulan sekali, adanya kegiatan pengelolaan sampah Di Desa Badau sebagai pengganti tong sampah selesai pengadaan ke Desa Badau maka pihak desa berupaya mengolah sampah yang bisa diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Pemerintah desa berupaya mengajak dan memberikan edukasi pengolahan sampah kepada masyarakat badau, dengan adanya pengolahan maka sampah tidak tertimbun dan tidak dimanfaatkan. Tempat pengolahan sampah tidak jauh dari jalan masuk menuju kantor desa.

Indeks ketahanan lingkungan belum ada upaya yang dilakukan dalam indikator tanggap bencana dengan indikator per item upaya/tindakan terhadap potensi bencana alam yang merupakan kewenangan desa dan instansi terkait. Desa Badau belum ada bencana alam yang terjadi sehingga belum ada upaya terhadap tanggap bencana.

PENUTUP

Pembahasan yang dihasilkan dalam uraian dapat diambil kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam peningkatan IDM Desa Badau Kabupaten Kapuas Hulu dan untuk mengetahui indikator-indikator penilaian dalam peningkatan IDM.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Badau dengan melibatkan masyarakat dari tahap awal perencanaan sampai tahap pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik 2 rabat beton yang telah dibangun dan 1 masih dalam proses dan 1 drainase. Pemerintah desa juga menitipkan modal kepada PKK dan Bumdes untuk modal, menghimbau gotong royong yang dilakukan pasti

dalam 2 bulan, memberikan edukasi dalam mengolah sampah. Untuk kegiatan gotong royong dan mengolah sampah merupakan indeks ketahanan sosial yang memiliki indikator pada kegiatan yang dilakukan. Sedangkan pembangunan fisik rabat beton dan drainase serta pengembangan Bumdes dan PKK merupakan indeks ketahanan ekonomi yang memiliki indikator dari kegiatan yang dilakukan.

Indikator-indikator peningkatan IDM terdapat dalam komponen IDM sebagai berikut:

1. Indeks ketahanan sosial, terdiri dari dimensi kesehatan, pendidikan, modal sosial, permukiman. Dimensi terdiri dari perangkat indikator.
2. Indeks ketahanan ekonomi, terdiri dari dimensi keragaman produksi, perdagangan, akses distribusi, akses kredit, lembaga ekonomi, keterbukaan wilayah. Dimensi terdiri dari perangkat indikator.
3. Indeks ketahanan lingkungan, terdiri dari dimensi kualitas lingkungan dan potensi dan tanggap bencana. Dimensi terdiri dari perangkat indikator.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, 2014, Dasar-dasar Kebijakan Publik, Penerbit Pustaka Pelajar, Jakarta.
Agustino, 2016, Dasar-dasar kebijakan Publik, Penerbit Pustaka Pelajar, Jakarta.
Moleong, Lexy J, 1994, Metodologi Penelitian Kualitatif, Jakarta, PT Remaja Rosadakarya.
Sugiyono, 2017, Metode Penelitian Kualitatif, Penerbit Alfabeta, Bandung.
Sumodiningrat, 2016, Membangun Indonesia dari Desa, Penerbit Media Pressindo, Yogyakarta.
Winarno, 2014. Kebijakan Publik (teori, proses dan studi kasus), yogyakarta, CAPS (center of academic publishing service)

Zuldafril dan Muhammad L. (2012). Penelitian Kualitatif, Surakarta, Yuma Pustaka.

Referensi Dokumen Negara

Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Peningkatan Status Kemajuan dan Kemandirian desa
Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Desa
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 tahun 2016 tentang Indeks desa Membangun.